

Kota 1.000 Bukit Lenyap oleh Galian Ilegal

SEBUTAN lain Kota Tasikmalaya sebagai Kota Seribu Bukit kini tak relevan lagi. Pasalnya, bukit-bukit yang terserak di sana sudah terkikis habis oleh pertambangan (galian C) ilegal.

Padahal sebelumnya, pertambangan ilegal terhadap deretan bukit yang ada di Kecamatan Bungursari di sepanjang Jalan Mangkubumi-Indihiang sudah dirazia Pemkot Tasikmalaya. Namun, sejak perizinan diambil alih Pemprov Jawa Barat awal tahun lalu pertambangan ilegal marak lagi. Pemkot Tasikmalaya, termasuk kepolisiannya pun tidak lagi melakukan razia.

“Ini fakta yang membuat kami prihatin. Kota Tasikmalaya selama ini dikenal dengan sebutan Kota Seribu Bukit, sekarang ini telah habis. Banyak dampaknya terutama serapan air telah

hilang. Kini, jumlah bukit yang ada tersisa sekitar 100 buah,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) Kota Tasikmalaya, Asep Devo, kemarin.

Asep mengatakan, hasil inventarisasi LPLHI yang dilakukan pada 2018 menunjukkan kondisi lingkungan Kota Tasikmalaya sudah tidak lagi bersahabat karena hampir 90% bukit kini kondisinya telah rata dan sudah tidak lagi bisa dinikmati masyarakat, seperti lahan bekas galian C yang sebagian besarnya gundul dan gersang. Tambang hanya mengeruk keuntungan dari pembelian tanah bukit-bukit tersebut untuk reklamasi.

“Seusai melakukan penggalian pasir dan batu, mereka pergi begitu saja. Situasi ini sangat bahaya

sebab bukit merupakan salah satu sumber tangkapan air alias *catchment area*. Dampaknya sudah terasa, saat kemarau masyarakat kesulitan air bersih, di musim hujan banjir,” ujarnya.

Salah satu pengusaha tambang, Nadirin, warga Kampung Rancanesa, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, mengakui galian C yang dilakukan para penambang semuanya tidak mengantongi izin.

“Kami mampu untuk membuat perizinan, tapi proses perizinan saat ini saling tuding antarperintah daerah dan provinsi. Birokrasinya bertele-tele dan biaya tinggi. Jadi, selama ini kami memberikan *fee* (pelicin) kepada sejumlah pihak. Soal kerusakan lingkungan bukan urusan kami, kami sudah mengeluarkan uang kok,” dalihnya. (AD/N-3)